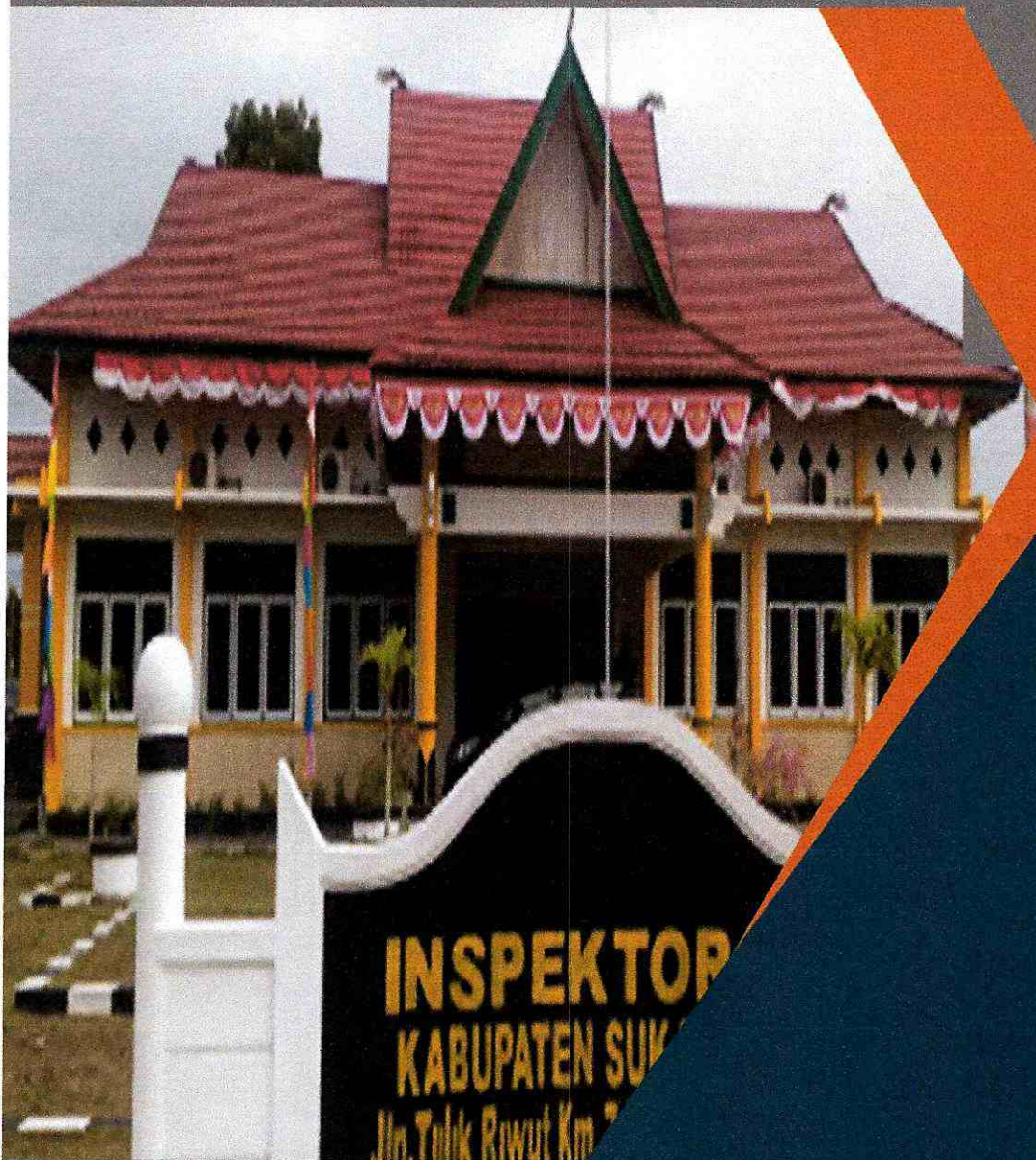


INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN
2019



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara periode Tahun Anggaran 2019 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik pada Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam pencapaian Visi dan Misi, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) yang menjadi harapan bersama. Laporan ini menggambarkan yang dicapai selama satu tahun anggaran 2019.

Akhir kata kepada seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Sukamara agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, dan akuntabel, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara .

Sukamara, Februari 2020

Inspektur Daerah
Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 1985031 009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara periode Tahun Anggaran 2019 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik pada Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam pencapaian Visi dan Misi, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) yang menjadi harapan bersama. Laporan ini menggambarkan yang dicapai selama satu tahun anggaran 2019.

Akhir kata kepada seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Sukamara agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, dan akuntabel, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara .

Sukamara, Februari 2020

Inspektur Daerah
Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 1985031 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Inspektorat Kab. Sukamara.....	3
D. Kondisi Umum.....	3
E. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	7
B. Rencana Kinerja.....	10
C. Penetapan Kinerja.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran 2019.....	24
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	27
B. Sasaran.....	28
LAMPIRAN:	
1. Struktur Organisasi Inspektorat	
2. Penetapan Kinerja	
3. Pengukuran Kinerja	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu dinas /instansi harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui LKIP melaporkan kepada atasan langsung yaitu Bupati Sukamara.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator. Indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Sukamara Tahun 2018-2023 dan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

Secara singkat laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Sukamara yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain: Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2019.

Capaian kinerja tahun 2019 terhadap 1 (satu) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran terdapat 2 sasaran yang kurang berhasil dan 11 indikator dengan capaian berhasil, 2 sasaran yang kurang berhasil disebabkan faktor internal pada kegiatan Penyusunan Standar Operasional Pengawasan dan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten

Sukamara pada Tahun 2019 dapat dikatakan telah mencapai sasaran interpretasi **BERHASIL** atau **MEMUASKAN**.

Sukamara, Februari 2020
Inspektur Daerah
Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009

Sukamara pada Tahun 2019 dapat dikatakan telah mencapai sasaran interpretasi **BERHASIL** atau **MEMUASKAN**.

Sukamara, Februari 2020
Inspektur Daerah
Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat untuk terwujudnya Pemerintahan yang profesional dan bersih. Hal ini tertuang pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Sukamara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai perwujudan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian visi, misi dan realisasi pencapaian indikator.

Dalam LKIP Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 yang merupakan tahun ke 1 (satu) masa Renstra 2018-2023, pengukuran kinerja yang dilakukan dengan mengukur pencapaian 1(satu) tujuan serta 1(satu) sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara 2018-2023 yang memiliki beberapa indikator sasaran sesuai tugas dan fungsinya.

Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan diadakan. Demikian pula kegiatan di Inspektorat Kabupaten Sukamara agar mendapat perhatian khusus mengingat lembaga besarnya tanggungjawab yang dibebankan pada Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sukamara disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
7. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 adalah:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara kepada Bupati Sukamara sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara menuju terwujudnya Pemerintah yang Profesional dan Bersih sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Sukamara.
2. Memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Inspektorat Kabupaten Sukamara.

C. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undang serta pelaksanaannya.

D. KONDISI UMUM

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bahwa tugas tertentu pemerintah daerah dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dan kantor.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan, Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya jadwal pemeriksaan dan jenis pemeriksaan setiap Inspektur Pembantu dengan wilayah masing-masing sesuai Peraturan Bupati Sukamara nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Skala prioritas pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan analisis risiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja yang cukup tinggi dalam hal pengelolaan Anggaran dan SDM
- Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti baik berupa sanksi administrasi dan kerugian Daerah/Negara
- Kurang tertibnya administrasi keuangan
Untuk meningkatkan wawasan serta profesionalisme dibidang pengawasan masing-masing pemeriksa diwajibkan untuk mengikuti bimtek dan pelatihan.

E. Susunan Kepegawaian dan Pelengkapan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara sesuai dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD)

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sukamara terlampir

Per 31 Desember 2019 jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah 23 (Dua Puluh Tiga) orang terdiri dari pejabat struktural eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 3 (Tiga) Orang, pejabat struktural eselon IV sebanyak 1 (satu) orang, Jabatan Fungsional Umum golongan III sebanyak 1(satu) orang dan golongan II sebanyak 1 (satu) orang, jabatan fungsional Auditor sebanyak 13 (Tiga belas) orang, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah (P2UPD) sebanyak 1 (Satu) orang dan Auditor Kepegawaian sebanyak 2 (Dua) orang dan 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak.

Kekuatan Pegawai Inspektorat Kabupaten Sukamara Per 31 Desember 2019 terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dengan susunan adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Menurut Status Kepegawaian

No	Status Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23 orang	PNS
2.	Tenaga kontrak	10 orang	Tenaga Kontrak
	Jumlah	33 orang	

2. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Golongan IV	6 orang	
2.	Golongan III	15 orang	
3.	Golongan II	2 orang	
	Jumlah	23 orang	

3. Menurut Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Eselon II. b	1 orang	
2.	Eselon III.a	3 orang	
3.	Eselon IV.a	1 orang	
	Jumlah	5 orang	

4. Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Kontrak	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sarjana S-2	3 orang		
2.	Sarjana S-1/Diploma IV	18 orang	3 orang	
4.	D-3	1 orang	- orang	
5.	SLTA / Sederajat	1 orang	7 orang	
6.	SLTP			
7.	SD			
Jumlah		23 orang	10 Orang	

Untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan urusan pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Sukamara didukung dengan sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 memaparkan mengenai sasaran dari visi, misi dan tujuan Inspektorat Kabupaten Sukamara yang menjadi sasaran utama dalam Indikator Kinerja Utama, serta mengevaluasi/menganalisis dari 1(satu) sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara. Semuanya disusun mengacu pada :

- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara 2018-2023
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Tahun 2019
- Dokumen Perjanjian Kinerja(PK) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Inspektorat Kabupaten Sukamara mengampu Misi ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Sukamara yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran, yang akan diwujudkan melalui strategis dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Manajemen Pemerintah Yang Profesional, Bersih, Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategis dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

Strategis	Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah 2. Peningkatan Kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 4. Peningkatan Profesionalisme pengawasan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Se jauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program atau kegiatan yang merupakan peran serta aktif sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu program Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Auditor
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan Standar Operasional Pengawasan
- 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan:
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
 - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan
 - Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
 - Pelaksanaan Evaluasi LKIP SOPD
 - Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI)
 - Rencana Aksi KPK
- 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan:
 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan inspektorat mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat. Didalam Rencana Kinerja Tahunan Dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana Kinerja Inspektorat sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam tahun bersangkutan, Indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Terpenuhinya pelayanan administrasi Perkantoran	100 %
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
		Terpenuhinya SOP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara	100 %
		Prosentase berkurangnya jumlah kerugian di Lingkungan Pemkab Sukamara	20 %
		Prosentase pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai ditangani	100 %
		Prosentase kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	70 %
		Prosentase Tindak Lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	40 %
		Prosentase terpenuhinya informasi dan laporan atas hasil pengawasan pada pihak ekstern Pemkab Sukamara	100 %
		Prosentase mambainya Laporan Akuntabilitas Kinerja SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara	40 %
		Prosentase terpenuhinya komitmen bersama Pemkab Sukamara dengan KPK	50 %
		Prosentase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan	90 %
		Prosentase Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	90 %

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja adalah tingkat hasil kinerja yang harus dicapai setelah kegiatan itu ditetapkan kegiatan yang sudah ditetapkan tertuang pada dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diberikan pernyataan Penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan memberikan tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah
- 3) Sebagai dasar keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- 4) Menciptakan tolak ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja
Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Terpenuhinya pelayanan administrasi Perkantoran	100 %
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
		Terpenuhinya SOP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara	100 %
		Prosentase berkurangnya	20 %

		jumlah kerugian di Lingkungan Pemkab Sukamara	
		Prosentase pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai ditangani	100 %
		Prosentase kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	70 %
		Prosentase Tindak Lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	40 %
		Prosentase terpenuhinya informasi dan laporan atas hasil pengawasan pada pihak ekstern Pemkab Sukamara	100 %
		Prosentase mambainya Laporan Akuntabilitas Kinerja SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara	40 %
		Prosentase terpenuhinya komitmen bersama Pemkab Sukamara dengan KPK	50 %
		Prosentase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan	90 %
		Prosentase Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban dalam dunia birokrasi.

Inspektorat Kabupaten Sukamara, selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sukamara untuk melaksanakan kewajiban bidang pengawasan, dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sukamara

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Sukamara telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Sukamara ditetapkan 1 sasaran dengan 12 indikator kinerja (outcome).

A. Capaian Indikator Organisasi

Dalam pengukuran pada LKIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Tahun 2019 merupakan tahun ke 1 (satu) pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara yang disusun tahun 2019 melaporkan capaian indikator sasaran pada tahun 2019 dan capaian tujuan serta penjabaran melalui alat ukur sasaran dari indikator sasaran setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam Renstra 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Sukamara.

1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Inspektorat Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu 1 sasaran yang ingin dicapai dengan 13 indikator sebagai tolak ukur tercapainya sasaran yang diperjanjikan.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Pengukuran dan analisis capaian kinerja dan anggaran akan disampaikan seperti pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja
Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Terpenuhinya pelayanan administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Berhasil
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	Berhasil
		Prosentase Peningkatan	100 %	100 %	Berhasil

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Terpenuhinya SOP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara	100 %	40 %	Kurang Berhasil
	Prosentase berkurangnya jumlah kerugian di Lingkungan Pemkab Sukamara	20 %	33,39 %	Kurang Berhasil
	Prosentase pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai ditangani	100 %	0,00 %	Kurang Berhasil
	Prosentase kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	70 %	66,67 %	Berhasil
	Prosentase Tindak Lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	40 %	65,67 %	Berhasil
	Prosentase terpenuhinya informasi dan laporan atas hasil pengawasan pada pihak ekstern Pemkab Sukamara	100 %	100 %	Berhasil
	Prosentase mambainya Laporan Akuntabilitas Kinerja SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara	50 %	92,31 %	Sangat Berhasil
	Prosentase terpenuhinya komitmen bersama Pemkab Sukamara dengan KPK	50 %	50 %	Berhasil
	Prosentase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan	90 %	100 %	Berhasil
	Prosentase Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	90 %	100 %	Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antar target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan realisasinya.

Jika dilihat dari pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa secara umum Inspektorat telah dapat melaksanakan tugas dengan

baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Adapun beberapa realisasi yang tidak sesuai dengan target lebih disebabkan faktor internal dan eksternal seperti:

- 1) Terpenuhinya Standar Operasional Pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara
- 2) Prosentase berkurangnya jumlah kerugian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
- 3) Prosentase Pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai ditangani
- 4) Prosentase Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 5) Prosentase Tindak Lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Adapun perhitungan persentase pencapaian target dalam penetapan Kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Analisis capaian untuk masing-masing indikator sasaran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran target 100 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari beberapa kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %
1	Terpenuhinya kebutuhan telpon, internet, TV kabel dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	
2	Terpenuhinya kebutuhan atas perpanjangan Pajak STNK Kendaraan roda 4 dan 2	11 Unit	11 Unit	
3	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	
4	Terciptanya dan terjaganya lingkungan kantor yang bersih	12 Bulan	12 Bulan	
5	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	
6	Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	
7	Terpenuhinya kebutuhan akan listrik dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan	
8	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	
9	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	
10	Terpenuhinya kebutuhan atas makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	
11	Terpenuhinya Kebutuhan akan informasi dan koordinasi pada pihak luar	12 Bulan	12 Bulan	
12	Berkurangnya keterlambatan dalam pelaksanaan administrasi dan kegiatan honor	25 %	25 %	
13	Terpenuhinya Kebutuhan akan informasi dan kordinasi pada kegiatan internal pemerintah dalam	100 %	100 %	

daerah			
Rata-rata Capaian			100 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi sesuai dengan target capaian sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % .

2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana target 100 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari beberapa kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %
1	T Terlaksananya pengadaan AC	1 Unit	1 Unit	
2	Terlaksanya pemeliharaan rutin gedung kantor	100 %	100 %	
3	Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	11 Unit	11 Unit	
4	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin	100 %	100 %	
5	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin	100 %	100 %	
Rata-rata Capaian				100 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi sesuai dengan target capaian sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % .

3. Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target 100 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari beberapa kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
3	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %
1	Terlaksanya Pelatihan Kantor Sendiri	2 Kali Pelatihan	2 Kali Pelatihan	
2	Tenilainya DUPAK dilingkungan Inspektorat Kab Sukamara	100 %	100 %	
Rata-rata Capaian				100 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi sesuai dengan target capaian sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % .

4. Terpenuhinya SOP dilingkungan Pemkab Sukamara target 100 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
4	Terpenuhinya SOP dilingkungan Pemkab Sukamara	100 %	40 %	40 %
1	Tersedianya Dokumen SOP	5 SOP	2 SOP	40 %
Rata-rata Capaian				40 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi lebih kecil dari target capaian sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 40 % .

5. Prosentase berkurangnya jumlah kerugian dilingkungan Pemkab Sukamara target 20 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
5	Prosentase berkurangnya jumlah kerugian dilingkungan Pemkab Sukamara	20	33,32	
1	Berkurang resiko kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara	20	33,32	
Rata-rata Capaian				33,39

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi lebih dari target capaian kinerja sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 33,39 % .

6. Prosentase pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai ditangani target 100 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
6	Prosentase pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai ditangani	100 %	0,00 %	0,00 %
1	Berkurangnya jumlah aduan yang belum ditindaklanjuti di tahun 2019	100 %	0,00 %	0,00 %

Rata-rata Capaian	0,00 %
-------------------	--------

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi lebih kecil dari target capaian kinerja sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 0,00 %.

7. Prosentase Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) target 70 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
7	Prosentase Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 %	66,67 %	66,67 %
1	Terlaksananya kegiatan penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	
Rata-rata Capaian				66,67 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi lebih kecil dari target capaian kinerja sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 66,67 %

8. Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan yang tindaklanjuti target 40 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
8	Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan yang tindaklanjuti	40 %		65,67
1	Terselesainya tindak lanjut hasil pengawasan sanksi administrasi	40 %	60,41	
2	Terselesainya tindak lanjut hasil pengawasan sanksi kerugian	75 %	33,32	
Rata-rata Capaian				65,67

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi lebih kecil dari target capaian kinerja sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 65,67 %.

9. Prosentase Terpenuhinya informasi dan Laporan atas hasil pengawasan pada pihak eksternal Pemkab Sukamara target 100 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
9	Prosentase Terpenuhinya informasidan Laporan atas hasil pengawasan pada pihak eksternal Pemkab Sukamara	100 %	100 %	100 %
1	Terlaksananya kerjasama pengawasan dengan pihak APIP	90 %	90 %	
Rata-rata Capaian				100 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi 100 %

10. Prosentase membaiknya Laporan Akuntabilitas kinerja SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara target 50 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
10	Prosentase membaiknya membaiknya Laporan Akuntabilitas kinerja SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara target	50 %	46,15 %	92,31 %
1	Membaiknya penyajian LKIP dilingkungan Pemkab Sukamara	50 %	46,15 %	
Rata-rata Capaian				92,31 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini dikarenakan SOPD dilingkungan SOPD yang dijadikan sampel untuk dievaluasi sebanyak 13 SOPD, dari 13 SOPD terdapat 6 SOPD yang nilai CC sehingga capaian sebesar 92,31 %

11. Prosentase terpenuhinya komitmen bersama Pemkab Sukamara dengan KPK target 50 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
11	Prosentase terpenuhinya komitmen bersama Pemkab Sukamara dengan KPK	50	50	100
1	Terpenuhinya Komitmen bersama antara Pemkab Sukamara dengan KPK	50	50	
Rata-rata Capaian				100 %

Sasaran dengan indikator kinerja ini mencapai realisasi sama dengan target capaian kinerja sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %.

12. Prosentase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan target 90 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 2 (dua) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
12	Prosentase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan	90 %	90 %	100 %
1	Tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat	90 %	90 %	
Rata-rata Capaian				100 %

Sasaran ini pada seluruh pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara mengikuti Bimtek dan Pelatihan sesuai dengan jadwal diklat yang telah disusun pada awal tahun 2019.

13. Prosentase Aparatur Pengawasan yang bersertifikat target 90 %

Indikator sasaran diatas terdiri dari 1 (satu) kegiatan seperti tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase (%)
13	Prosentase Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	90 %	90 %	100 %
1	Sertifikat bagi tenaga fungsional dilingkungan Inspektorat Kab Sukamara	90 %	90 %	
Rata-rata Capaian				100 %

Sasaran ini pada pegawai Jabatan Fungsional Tertentu mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Pusdiklatwas BPKP di Ciawi Bogor sebanyak 13

orang dan Pejabat Pengawas Pemerintahan Daerah 1 (satu) orang mengikuti pelatihan di Kementerian Dalam Negeri dan 2 (dua) orang Auditor Kepegawaian mengikuti Pelatihan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan pada tahun 2019 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sukamara bersumber dari DPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.386.109.625,00 sedangkan DPPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.433.709.625,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.349.791.551,00 atau 80,05 %.

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran 2019

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	DPPA TA.2019	Rp5.433.709.625,00	Rp4.349.791.551,00	80,05

Capaian realisasi keuangan sebesar 80,05 % dan untuk terinci untuk masing-masing komponen belanja tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	717.558.800	632.453.717	88,14
1	Belanja Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000	37.766.938	51,17
2	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.400.000	6.981.200	94,34
3	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	134.860.000	125.985.000	93,42
4	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	7.500.000	7.408.500	98,78
5	Penyediaan alat tulis kantor	60.750.000	59.746.000	98,35
6	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	26.100.000	23.339.300	89,42
7	Belanja Instalasi Komponen	7.500.000	7.421.000	98,95

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
8	Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.340.000	16.690.000	96,25
9	Belanja Bahan Logistik Kantor	3.890.000	1.192.000	30,64
10	Belanja Makanan dan Minuman	49.710.000	39.011.000	78,48
11	Belanja Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	109.975.000	107.904.379	98,12
12	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	211.233.800	197.058.400	93,29
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7.500.000	1.950.000	26,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.930.000	135.513.750	70,98
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.500.000	8.500.000	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	15.000.000	410.000	2,73
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	134.380.000	98.583.750,00	73,36
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.550.000	15.750.000	83,94
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.500.000	12.450.000	85,86
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.110.000	39.973.300	60,46
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.150.000	36.013.300	60,88
2	Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Auditor	6.960.000	3.960.000	56,90
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.510.000	2.114.000	14,57
1	Penyusunan Standar Operasional Pengawasan	14.510.000	2.114.000	14,57

5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.389.867.665,28	1.050.336.529	75,57
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	796.200.000	716.441.600	89,98
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	83.150.000	2.365.000	2,84
3	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	80.800.000	78.266.829	96,86
4	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	39.831.000	6.670.000	16,75
5	Pelaksanaan Evaluasi LKIP SOPD	51.440.000	43.248.800	84,07
6	Pemberantasam Pungutan Liar (PUNGLI)	125.000.000	114.048.800	91,24
7	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	175.746.665,28	81.072.700	46,13
8	Rencana aksi KPK	37.700.000	8.222.800	21,81
6	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	280.000.000	259.973.640	96,62
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	150.000.000	141.547.260	94,36
2	Pelatihan Teknis Pengembangan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	130.000.000	118.426.380	91,10

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Sukamara telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) periode 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2018-2023. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pengawasan, terhadap 1 tujuan dan 1 sasaran strategisnya sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasinya dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Adapun capaian kinerja tahun 2019 terhadap 1 (satu) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran terdapat 2 sasaran yang kurang berhasil dan 11 indikator dengan capaian berhasil, 2 sasaran yang kurang berhasil disebabkan faktor internal. Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara pada Tahun 2019 dapat dikatakan telah mencapai sasaran interpretasi **BERHASIL** atau **MEMUASKAN**.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara tahun 2018-2023, khususnya tahun anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Indikator Utama Inspektorat Kabupaten Sukamara dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami sadari diakibatkan oleh beberapa kelemahan dari internal maupun kurang optimalnya untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk tercapainya sasaran sangat diperlukan kemampuan internal serta komitmen Pemerintah dalam Bidang Pengawasan.

B. Saran

Untuk itu diperlukan adanya penambahan SDM aparatur dibidang pengawasan dengan kompetensi yang sesuai, dan peningkatan kompetensi SDM yang telah ada melalui Bimtek dan Pelatihan. Sehingga diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, tentunya juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian laporan ini dibuat sekaligus bahan informasi kepada semua pihak terkait, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka upaya kita bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik di negeri ini.

Sukamara, Februari 2020
Inspektur Daerah
Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara tahun 2018-2023, khususnya tahun anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Indikator Utama Inspektorat Kabupaten Sukamara dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami sadari diakibatkan oleh beberapa kelemahan dari internal maupun kurang optimalnya untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk tercapainya sasaran sangat diperlukan kemampuan internal serta komitmen Pemerintah dalam Bidang Pengawasan.

B. Saran

Untuk itu diperlukan adanya penambahan SDM aparatur dibidang pengawasan dengan kompetensi yang sesuai, dan peningkatan kompetensi SDM yang telah ada melalui Bimtek dan Pelatihan. Sehingga diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, tentunya juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian laporan ini dibuat sekaligus bahan informasi kepada semua pihak terkait, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka upaya kita bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik di negeri ini.

Sukamara, Februari 2020
Inspektur Daerah
Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. WILBARNOPE
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : H. WINDU SUBAGIO
Jabatan : Bupati Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Bupati Sukamara

H. WINDU SUBAGIO

Sukamara,

2019

PIHAK KESATU

Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
		Terpenuhinya SOP dilingkungan Inspektorat Kab Sukamara	100 %
		Prosentase berkurangnya jumlah kerugian di Lingkungan Pemkab Sukamara	20 %
		Prosentase pengaduan masyarakat/permintaan yang selesai di tangani	100 %
		Prosentase kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	70 %
		Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	40 %
		Prosentase terpenuhinya informasi dan Laporan atas hasil Pengawasan pada pihak ekstern Pemkab Sukamara	100 %
		Prosentase membaiknya Laporan akuntabilitas kinerja SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara	40 %
		Prosentase terpenuhinya komitmen bersama antara Pemkab Sukamara dengan KPK	50 %
		Prosentase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansif pengawasan	90 %
		Prosentase Aparatur pengawasan yang bersertifikat	90 %

	Program	Pagu Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 707.583.800,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 187.930.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 66.110.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 14.510.000,00
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Rp 1.355.242.665,28
6	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya Pengawasan	Rp 280.000.000,00

PIHAK KEDUA
Bupati Sukamara



H. WINDU SUBAGIO

Sukamara, 2019

PIHAK KESATU



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Harkani,SH
Jabatan : Plh. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs.WILBARNOPE
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara

Drs. WILBARNOPE

Pembina Utama Muda

NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU

H. HARKANI,SH

Pembina Tk. I

NIP.1960320 198803 1 008

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan	13	Kegiatan
2	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan
3	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan
4	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	1	Kegiatan
5	Tercapainya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan	8	Kegiatan
6	Tercapainya Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya Pengawasan	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan

Sukamara, Januari 2019

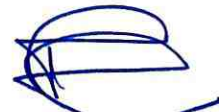
PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU



H. HARKANI, SH
Pembina Tk. I
NIP.1960320 198803 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Harkani,SH
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs.WILBARNOPE
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara

Drs. WILBARNOPE

Pembina Utama Muda

NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU

H. HARKANI,SH

Pembina Tk. I

NIP.1960320 198803 1 008

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Kegiatan Pengawasan di Irban II.	Jumlah Objek Pengawasan	SOPD Kecamatan Desa Sekolah UPTD Kesehatan

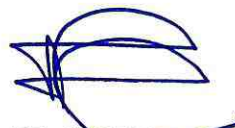
Sukamara, Januari 2019

PIHAK KEDUA
Inspektur Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU



H. HARKANI, SH
Pembina Tk. I
NIP.1960320 198803 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANDERSON, S.AP., M.Si
Jabatan : Irban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs.WILBARNOPE
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Mei 2019

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara

Drs.WILBARNOPE

Pembina Utama Muda

NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU

ANDERSON, S.AP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19701105 198911 1 011

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Kegiatan Pengawasan di Irban Wilayah I.	Jumlah Objek Pengawasan		SOPD Kecamatan Desa Sekolah UPTD Kesehatan

Sukamara, Mei 2019

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE

Pembina Utama Muda

NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU



ANDERSON, S.AP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19701105 198911 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARAPAN WAHAI, S.Sos., MH
Jabatan : Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs.WILBARNOPE
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Juni 2019

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara

PIHAK KESATU

Drs.WILBARNOPE

Pembina Utama Muda

NIP.19601130 198503 1 009

HARAPAN WAHAI, S.Sos., MH

Pembina Tk. I

NIP.19681013 198203 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Kegiatan Pengawasan di Irban Wilayah II.	Jumlah Objek Pengawasan	SOPD Kecamatan Desa Sekolah UPTD Kesehatan

Sukamara, Juni 2019

PIHAK KEDUA
Inspektur Daerah



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU



HARAPAN WAHAI, S.Sos., MH
Pembina Tk. I
NIP.19681013 198203 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : BENNY TAUFIQ,ST
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : H. Harkani, SH
Jabatan : Plh. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

PIHAK KEDUA

Plh Sekretaris

H. HARKANI, SH

Pembina Tk. I

NIP.19620320 198803 1 008

PIHAK KESATU

BENNY TAUFIQ,ST

Penata

NIP.19820609 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	
1	Tersusunnya Dokumen SOP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah Dokumen SOP yang telah terbit	5	SOP
2	Terlaksananya Pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik pada PKPT 2019	100	%
3	Terselesainya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	Jumlah Kasus pengaduan yang masuk ditangani/diselesaikan	90	%
4	Terlaksananya pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan SPIP dan Kapabilitas APIP	6	Kali pertemuan
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terpenuhinya tindak lanjut atas hasil kegiatan pengawasan	5	Kecamatan
6	Terlaksananya Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah koordinasi dengan pihak eksternal	23	Orang
7	Terlaksananya Evaluasi LkjIP SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	Jumlah Dokumen Evaluasi LkjIP yang terbit	100	%
8	Terlaksananya Kegiatan SABER PUNGLI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	Jumlah Laporan SABER PUNGLI	12	Bulan
9	Terlaksananya Rencana Aksi KPK	Prosentase pemenuhan rencana aksi KPK antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan KPK	50	%

PIHAK KEDUA

Plh Sekretaris



H. HARKANI, SH

Pembina Tk. I

NIP.19620320 198803 1 008

Sukamara, Januari 2019

PIHAK KESATU



BENNY TAUFIQ, ST

Penata

NIP.19820609 201001 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HENDRYAWAN UTAMA PUTRA,SE
Jabatan : Plh. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : H. Harkani, SH
Jabatan : Plh. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Januari 2019

PIHAK KEDUA

Plh Sekretaris

H.HARKANI, SH

Pembina Tk. I

NIP.19620320 198803 1 008

PIHAK KESATU

HENDRAYAWAN UTAMA PUTRA,SE

Penata Tk.I

NIP.19720830 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya biaya listrik dan internet	Jumlah pembayaran biaya listrik dan internet	12	Bulan
2	Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah pajak kendaraan roda dan roda 2	9	Unit
3	Tersedianya jasa administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah pembayaran biaya honorarium PNS	12	Bulan
4	Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah peralatan kebersihan	12	Bulan
5	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12	Bulan
6	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Jumlah belanja barang cetak dan penggandaan	10	Item
7	Tersedianya komponen penerangan komponen listrik	Jumlah Komponen alat penerangan listrik	12	Bulan
8	Tersedianya bahan bacaan di lingkungan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	❖ Jumlah Surat kabar harian lokal ❖ Publikasi	12 1	Bulan Tahun
9	Tersedianya bahan logistik kantor	❖ Jumlah BBM dan Oli mesin potong rumput ❖ Tabung gas	1 6	Tahun Buah
10	Terpenuhi makan dan minum	❖ Jumlah tersedianya makan dan minum harian pegawai ❖ Jumlah tersedianya makan dan minum rapat ❖ Jumlah tersedianya makan dan minum tamu	2 2 2	Item Item item
11	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun
12	Tersedianya jasa tenaga kontrak	❖ Jumlah tersedianya biaya tenaga kontrak ❖ Jumlah tersedianya biaya belanja	1 10	Tahun Orang

		Asuransi Jaminan kematian (JKM) ❖ Jumlah tersedianya biaya belanja Asuransi Jaminan kecelakaan Kerja (JKK)	10	orang
13	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	1	Tahun
14	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Unit
15	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	Tahun
16	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11	Unit
17	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	18	Unit
18	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	38	Unit
19	Tersedianya bimtek dilingkungan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	7	kali
20	Terpenuhinya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	28	Orang
21	Terpenuhinya Pelatihan teknis dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pelatihan teknis dan penilaian akuntabilitas kinerja	14	Orang

PIHAK KEDUA

Plh Sekretaris



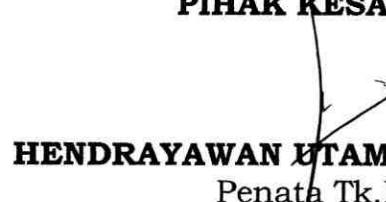
H. HARKANI, SH

Pembina Tk. I

NIP.19620320 198803 1 008

Sukamara, Januari 2019

PIHAK KESATU



HENDRAYAWAN UTAMA PUTRA, SE

Penata Tk. I

NIP.19720830 200312 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ELVRINA SEPTIAWATY, S.STP
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs. WILBARNOPE
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara

Drs. WILBARNOPE

Pembina Utama Muda

NIP.19601130 198503 1 009

Sukamara, Mei 2019

PIHAK KESATU

ELVRINA SEPTIAWATY, S.STP

Pembina

NIP.19810924 199912 2 002

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan	13	Kegiatan
2	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan
3	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan
4	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	1	Kegiatan
5	Tercapainya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan	8	Kegiatan
6	Tercapainya Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya Pengawasan	Jumlah Kegiatan	2	Kegiatan

Sukamara, Mei 2019

PIHAK KEDUA

Inspektur Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

PIHAK KESATU



ELVRINA SEPTIAWATY, S.STP
Pembina
NIP.19810924 199912 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : BENNY TAUFIQ,ST
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Sekretaris

ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP
Pembina
NIP.19810924 199912 2 002

Sukamara, Mei 2019
PIHAK KESATU


BENNY TAUFIQ,ST
Penata

NIP.19820609 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	
1	Tersusunnya Dokumen SOP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah Dokumen SOP yang telah terbit	5	SOP
2	Terlaksananya Pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik pada PKPT 2019	100	%
3	Terselesainya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	Jumlah Kasus pengaduan yang masuk ditangani/diselesaikan	90	%
4	Terlaksananya pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan SPIP dan Kapabilitas APIP	6	Kali pertemuan
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terpenuhinya tindak lanjut atas hasil kegiatan pengawasan	5	Kecamatan
6	Terlaksananya Pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah koordinasi dengan pihak eksternal	23	Orang
7	Terlaksananya Evaluasi LkjIP SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	Jumlah Dokumen Evaluasi LkjIP yang terbit	100	%
8	Terlaksananya Kegiatan SABER PUNGLI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	Jumlah Laporan SABER PUNGLI	12	Bulan
9	Terlaksananya Rencana Aksi KPK	Prosentase pemenuhan rencana aksi KPK antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan KPK	50	%

PIHAK KEDUA
Sekretaris


ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP
Pembina
NIP.19810924 199912 2 002

Sukamara, Mei 2019
PIHAK KESATU


BENNY TAUFIQ,ST
Penata
NIP.19820609 201001 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**



PERJANJIAN KINERJA 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel berpotensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HENDRYAWAN UTAMA PUTRA,SE
Jabatan : Plh. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukamara

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukamara, Mei 2019

PIHAK KEDUA
Sekretaris

ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP
Pembina
NIP.19810924 199912 2 002

PIHAK KESATU

HENDRAYAWAN UTAMA PUTRA,SE
Penata Tk.I
NIP.19720830 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya biaya listrik dan internet	Jumlah pembayaran biaya listrik dan internet	12	Bulan
2	Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah pajak kendaraan roda dan roda 2	9	Unit
3	Tersedianya jasa administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah pembayaran biaya honorarium PNS	12	Bulan
4	Terpeliharanya kebersihan dilingkungan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah peralatan kebersihan	12	Bulan
5	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12	Bulan
6	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Jumlah belanja barang cetak dan penggandaan	10	Item
7	Tersedianya komponen penerangan komponen listrik	Jumlah Komponen alat penerangan listrik	12	Bulan
8	Tersedianya bahan bacaan di lingkungan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	❖ Jumlah Surat kabar harian lokal	12	Bulan
9	Tersedianya bahan logistik kantor	❖ Publikasi	1	Tahun
		❖ Jumlah BBM dan Oli mesin potong rumput	1	Tahun
10	Terpenuhi makan dan minum	❖ Tabung gas	6	Buah
		❖ Jumlah tersedianya makan dan minum harian pegawai	2	Item
		❖ Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	2	Item
		❖ Jumlah tersedianya makan dan minum tamu	2	item
11	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun
12	Tersedianya jasa tenaga kontrak	❖ Jumlah tersedianya biaya tenaga kontrak	1	Tahun
		❖ Jumlah tersedianya biaya belanja Asuransi Jaminan	10	Orang

		kematian (JKM) ❖ Jumlah tersedianya biaya belanja Asuransi Jaminan kecelakaan Kerja (JKK)	10	orang
13	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	1	Tahun
14	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Unit
15	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	Tahun
16	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11	Unit
17	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	18	Unit
18	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	38	Unit
19	Tersedianya bimtek dilingkungan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	7	kali
20	Terpenuhinya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	28	Orang
21	Terpenuhinya Pelatihan teknis dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pelatihan teknis dan penilaian akuntabilitas kinerja	14	Orang

PIHAK KEDUA
Sekretaris

ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP
Pembina
NIP.19810924 199912 2 002

Sukamara, Mei 2019
PIHAK KESATU

HENDRAYAWAN UTAMA PUTRA,SE
Penata Tk.I
NIP.19720830 200312 1 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Terpenuhinya pelaksanaan program kerja pemeriksaan tahunan Tahun 2019 pada	25%	50%	75%	100%

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/Keluaran	REALISASI				HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Reguler					Jumlah LHP Reguler	√	√	√	√	Kegiatan Pengawasan reguler lebih menitikberatkan pada 4 aspek seperti : Aspek Keuangan, Aspek SDM, Aspek Pengelolaan Barang dan Aspek Tugas dan Fungsi . Dan upaya pengawasan LKPD serta reviu sesuai dengan petunjuk teknis	Ke depan dalam penyusunan rencana aksi dan PKPT harus lebih memperhatikan unsur risk audit dan pelaksanaan pemeriksaan/audit harus sesuai jadwal di PKPT
2	Pelaksanaan Kegiatan reviu Keuangan, LKIP Kabupaten, Revlu RKA, Revlu Penyerapan Anggaran dan PBJ	√	√	√	√	Jumlah LHR Revlu	√	√	√	√	214.932.480,00	
3	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut atas LHP Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK	√	√	√	√	Rekap Penyelesaian Tindak Lanjut				√	81.072.700,00	1). Akan dilakukan pemantauan dan penagihan tindak lanjut lebih lbtehsif,2). Akan melakukan koordinasi dengan Sekretariat TPKD untuk penyelesaian kerugian daerah dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan sesuai PKPT yang telah dijadwalkan
4	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LKIP SOPD	√	√			Jumlah LHP Evaluasi LKIP SOPD		√			43.248.800,00	Akan dilakukan evaluasi lebih intensif dengan melakukan perbaikan pada Perencanaan Kinerja,Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2. Terselenggaranya kasus-kasus yang terjadi di Lingkungan Sukamara	25%	50%	75%	100%

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/Keluaran	REALISASI				HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah	√	√	√	√	Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang ditangani	√				2.365.000,00 Penanganan kasus pengaduan dilakukan atas dasar kasus yang masuk ke Inspektorat atau berdasarkan permintaan oleh Bupati	Perlu dilakukan peningkatan kegiatan kasus/pengaduan sehingga bisa menangani kasus pengaduan yang masuk ke inspektorat dapat ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3. Terlaksananya rapat koordinasi bidang pengawasan	25%	50%	75%	100%

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/Keluaran	REALISASI				HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	Pelaksanaan Pengawasan yang lebih komprehensif	√	√	√	√	Terlaksana koordinasi dengan pihak eksternal		√		√	78.266.829,00 Pelaksanaan koordinasi dilakukan atas Rakor TL dengan BPK dan Inspektorat Provinsi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng	Perlu dilakukan koordinasi lebih intensif seperti RAKOR TL dengan Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (40 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.Meningkatnya jumlah saran sanksi administrasi yang di tindak lanjuti.	10	20	30	40
	4.Meningkatnya jumlah saran sanksi kerugian daerah yang di tindak lanjuti.	25%	50%	65%	75%

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/keluaran	REALISASI				HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√	√	Jumlah tindak lanjut yang selesai				√	Pemantauan Kegiatan tindak lanjut dilakukan pada triwulan IV	1). Akan dilakukan pemantauan dan penagihan tindak lanjut lebih insentif sesuai dengan jadwal yang telah tertuang dalam PKPT 2). Berkoordinasi dengan Tim TPKD dan MPPKD atas temuan yang mengandung bentuk kerugian daerah dan sanksi administrasi untuk mendorong penyelesaian tindak lanjutnya.
2	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten dan Provinsi	√	√	√	√	Jumlah tindak lanjut yang selesai				√	Pemantauan Kegiatan tindak lanjut dilakukan pada triwulan IV	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (90 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	25%	50%	75%	90%

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/Keluaran	REALISASI					HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	ANGGARAN		
1	Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya		✓	✓	✓	Jumlah Pegawai Inspektoral yang mengikuti pelatihan		✓	✓	✓	141.547.260,00	Pelatihan yang diikuti dari Undangan BPKP dan kementerian dalam negeri	Akan didukung Anggaran yang mencukupi untuk mengikuti Bimtek dan Pelatihan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (90 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	6. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan teknis pengawas dan penilaian akuntabilitas kinerja.	25%	50%	75%	90%

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/Keluaran	REALISASI					HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	ANGGARAN		
1	Pelaksanaan Pelatihan teknis pengawas dan penilaian akuntabilitas kinerja		✓	✓	✓	Jumlah Pegawai Inspektoral yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan		✓	✓	✓	118.426.380,00	Pelatihan yang diikuti dari Undangan BPKP dan kementerian dalam negeri	Akan didukung Anggaran yang mencukupi untuk mengikuti Pelatihan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (50 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	7. Jumlah LAKIP SKPD yang di monitoring dan di evaluasi oleh Inspektorat.	50%			

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				Output/Keluaran	REALISASI				HASIL EVALUASI	UPAYA TINDAK LANJUT
		TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	Pelaksanaan Kegiatan evaluasi LKIP SOPD	V				Jumlah SOPD yang telah di evaluasi kinerjanya	V				Berdasarkan hasil Evaluasi SOPD dilingkungan Pemkab Sukamara mendapat predikat "CC" dari 13 SOPD sekitar 92,31 %	Akan dilakukan evaluasi lebih intensif dengan melakukan perbaikan pada Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

INSPEKTUR KABUPATEN SUKAMARA



Drs. WILBARI NOPE
Pembina Utama Muda
NIP.19601130 198503 1 009

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Terpenuhinya pelaksanaan program kerja pemeriksaan tahunan pada inspektorat Tahun 2019	25%	50%	75%	100%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Reguler (PDDT, Evaluasi Dana Desa, Audit Operasional, Evaluasi Dana BOS,)		✓	✓	✓	Jumlah LHP Reguler	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	598.150.000,00
2	Pelaksanaan Kegiatan reviu Keuangan, LKIP Kabupaten, Reviu DAK, Reviu RKA, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ dan Reviu Lainnya	✓	✓	✓	✓	Jumlah LHR Reviu	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	198.050.000,00
3	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut atas LHP Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK	✓	✓	✓	✓	Rekap Penyelesaian Tindak Lanjut	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak Lanjut Hasil Temuan	141.121.665,28
4	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LKIP SOPD	✓	✓			Jumlah LHP Evaluasi LKIP SOPD	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan Evaluasi LKIP SOPD	51.440.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2. Terselesaikannya kasus-kasus yang terjadi di Lingkungan Sukamara	25%	50%	75%	100%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	√	√	√	√	Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang ditangani	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Sukamara	83.150.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (100 Orang)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3. Terlaksananya rapat koordinasi bidang pengawasan	25%	50%	75%	90%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Pelaksanaan Pengawasan yang lebih komprehensif	√	√	√	√	Terlaksana koordinasi dengan pihak eksternal	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan yang lebih komprehensif	80.800.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (40 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4. Meningkatkan jumlah saran sanksi administrasi yang di tindak lanjuti.	10	20	30	40
	4. Meningkatkan jumlah saran sanksi kerugian daerah yang di tindak lanjuti.	25%	50%	65%	75%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut BPK	✓	✓	✓	✓	Jumlah tindak lanjut yang selesai	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	33.000.000,00
2	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut APIP (Inspektorat Kabupaten dan Provinsi)	✓	✓	✓	✓	Jumlah tindak lanjut yang selesai	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	45.675.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (90 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	25%	50%	75%	90%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		✓	✓	✓	Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti pelatihan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (90 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	6. Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.	25%	50%	75%	90%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Pelaksanaan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		V	V	V	Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	130.000.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (50 %)			
		TR I	TR II	TR III	TR IV
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	7. Jumlah LAKIP SKPD yang di monitoring dan di evaluasi oleh Inspektorat.	50%			

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
		Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
1	Pelaksanaan Kegiatan evaluasi LKIP SOPD	V				Jumlah SOPD yang telah di evaluasi kinerjanya	Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan evaluasi LKIP SOPD	51.440.000,00

INSPEKTUR KABUPATEN SUKAMARA


Drs. WILBAR NOPE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601130 198503 1 009

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA**

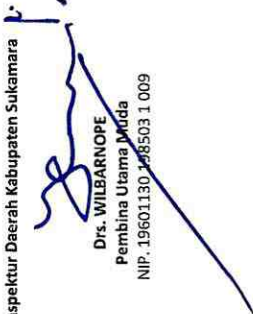
No	Sasaran	Program	Kegiatan					% Pencapaian Target	Keterangan
			Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhi biaya pemakaian telepon, internet, TV Kabel dan Listrik Hasil: Terpenuhi kebutuhan telepon, internet, Tv Kabel dan Listrik	Rp Bulan Bulan	73.800.000,00 12,00 12,00	37.766.938,00 12,00 12,00	100 % 51,17% 100%	
			2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhi perpanjangan Pajak STNK Kendaraan Roda 4 dan 2 Hasil: Terpenuhi kebutuhan alas perpanjangan Pajak STNK Kendaraan roda 4 dan 2	Rp Unit Unit	7.400.000,00 11,00 11,00	6.981.200,00 11,00 11,00	94,34% 100,00% 100,00%	
			3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhi pembayaran honorarium Hasil: Terpenuhi pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan	Rp Bulan Bulan	134.860.000,00 12,00 12,00	125.985.000,00 12,00 12,00	93,42% 100,00% 100,00%	
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhi peralatan dan bahan kebersihan Hasil: Terpenuhi dan teraganya lingkungan kantor yang bersih	Rp Bulan Bulan	7.500.000,00 12,00 12,00	7.408.500,00 12,00 12,00	98,75% 100,00% 100,00%	

		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan: Dana Keluaran: Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu Hasil: Terpenuhinya kebutuhan atas makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Rp	49,710,000.00	39,011,000.00	100 % 78.48%	
				Bulan		12.00	12.00	100.00%	
				Bulan		12.00	12.00	100.00%	
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan: Dana Keluaran: Terlaksana Perjalanan Dinas keluar daerah Hasil: Terpenuhinya kebutuhan akan informasi dan koordinasi pada pihak luar	Rp	109,975,000.00	107,904,379.00	100 % 98.12%	
				Bulan		12.00	12.00	100.00%	
				Bulan		12.00	12.00	100.00%	
		12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhinya pembayaran tenaga honor sebanyak 10 orang Hasil: Berkurangnya keterlambatan dalam pelaksanaan administrasi dan kegiatan honor	Rp	211,233,800.00	197,058,400.00	100 % 93.29%	
				%		10.00	10.00	100.00%	
				%		25.00	25.00	100.00%	

		20	Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Auditor	Masukan: Dana Keluaran: Terlaksananya DUPAK dilindungi inspektorat Kab Hasil: Meningkatnya kemampuan kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Rp % %	6,960,000.00 100.00 80.00	3,960,000.00 100.00 80.00	58.90 % 56.90% 100.00% 100.00%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21	Penyusunan Standar Operasional Pengawasan	Masukan: Dana Keluaran: Tersedianya Dokumen SOP Hasil: Terpenuhi SOP dalam meningkatkan tugas dan fungsi	Rp SOP %	14,510,000.00 5.00 100.00	2,114,000.00 2.00 40.00	40 % 14.5% 40.00% 40.00%	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	22	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Masukan: Dana Keluaran: Tersedianya dokumen laporan hasil pemeriksaan Hasil: Berkurang resiko	Rp % %	796,200,000.00 100.00 20.00	716,441,600.00 96.00 33.32	33.39 % 89.98% 96.00% 33.39%	
		23	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemkab Sukamara	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhi tindak lanjut atas kasus Hasil: Berkurangnya jumlah aduan yang belum ditindaklanjuti di tahun 2019	Rp % %	83,150,000.00 100.00 10.00	2,365,000.00 - -	0.00 % 2.84% 0.00% 0.00%	
		24	Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Masukan: Dana Keluaran: Terlaksananya kegiatan penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP Hasil: Terlaksananya kegiatan penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP	Rp Pertemuan Level	39,831,000.00 6.00 3.00	6,670,000.00 6.00 2.00	66.67 % 16.75% 100.00% 66.67%	

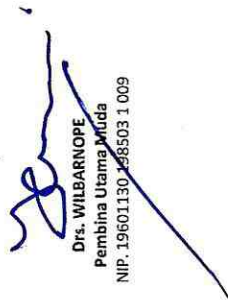
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	30	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhinya Bimtek dan Pelatihan bagi pemeriksa Hasil: Tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat	Rp 150,000,000.00 28.00 90.00	141,547,260.00	94.36	100.00 %
	31	Pelatihan Teknis pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas kinerja	Masukan: Dana Keluaran: Diklat dan Bimtek bagi Tenaga Fungsional Hasil: Sertifikat bagi tenaga fungsional di lingkungan Inspektorat Kab Sukamara	Rp 130,000,000.00 14.00 90.00	118,426,380.00	91.10	100.00 %

Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara


Drs. WILBAR NOPE
Pembina Utama Madya
NIP. 196011301985031 009

Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	30	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Masukan: Dana Keluaran: Terpenuhi Bimtek dan Pelatihan bagi pemeriksa Hasil: Tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat	Rp 150,000,000.00 28.00 90.00	141,547,260.00 28.00 90.00	94.36 100.00 100.00	100.00 %
	31	Pelatihan Teknis pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas kinerja	Masukan: Dana Keluaran: Diklat dan Bimtek bagi Tenaga Fungsional Hasil: Sertifikat bagi tenaga fungsional di lingkungan Inspektorat Kab Sukamara	Rp 130,000,000.00 14.00 90.00	118,426,380.00 14.00 90.00	91.10 100.00 100	100.00 %

Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara


Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009